

## **Tranformasi Penetapan Ibu Kota Negara Dalam Pelayanan Publik Terkait Infrastruktur di Kabupaten Penajam Paser Utara**

**Yayan Andri<sup>1\*</sup>, Meti Mediyastuti Sofyan<sup>1</sup>, Rikki Maulana Yusup<sup>1</sup>, Ramaditya  
Rahardian<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Bandung

\*Corresponding Author E-mail: [yayan.andri@umbandung.ac.id](mailto:yayan.andri@umbandung.ac.id)

### **Abstract**

This study describes the Impact of the Determination of the National Capital City on the Quality of Infrastructure Services of the National Capital City in Penajam Paser Utara Regency (Roads, Land Acquisition, Dams, Toll Roads) where Infrastructure plays a role in various sectors of life, especially for the local community of Penajam Paser Utara Regency who are directly affected by the development of the New Capital City infrastructure. Infrastructure development is one of the important role holders in life, especially road infrastructure, apart from being a means and infrastructure for transportation, it is also a supporting aspect in the distribution of goods and other supporting facilities. The research method used in this study is descriptive analysis with the type of research being qualitative. The results of the study, the success or failure of the development of the New Capital City, is very much determined by how the leadership relay will go forward which will have a direct impact on the quality of public services provided to the residents of Penajam Paser Utara which is currently underway. such as road infrastructure and furthermore will have an impact on the quality of basic services such as education, health and infrastructure

Keywords: Quality of Service, Infrastructure, Capital City of the Archipelago.

---

## **PENDAHULUAN**

Pada tanggal 29 April 2019 Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan rencana pemindahan ibu kota negara dalam rapat terbatas dengan para menteri di kantor presiden. Alasan dari pemindahan ibu kota karena kondisi Jakarta dinilai tidak lagi memungkinkan untuk beberapa tahun kedepan. Jokowi menyebutkan, DKI Jakarta saat ini memikul dua beban berat, yakni sebagai pusat pemerintahan dan layanan publik serta pusat bisnis. Ia mempertanyakan kemampuan kota ini di masa depan untuk memikul beban tersebut. Jokowi juga menceritakan bahwa sebenarnya wacana pemindahan ibu kota sudah ada sejak Presiden Sukarno menjadi kepala negara. Bahkan, dalam setiap kepemimpinan yang baru selalu

\* Copyright (c) 2025 **Yayan Andri et.al**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Diterima: 19 Agustus 2024; Direvisi: 25 Desember 2024; Disetujui: 16 April 2025

dibahas, namun tidak pernah diputuskan dan direncanakan dengan matang. Pemindahan ibu kota memerlukan persiapan yang matang dan detail, termasuk dari sisi pemilihan lokasi dengan memperhatikan aspek geopolitik, geostrategis, hingga kesiapan infrastruktur pendukung hingga pembiayaan (Maku et al., 2023).

Pusat perhatian saat ini adalah terkait Dampak Penetapan Ibu Kota Negara Terhadap Kualitas Pelayanan Infrastruktur Ibu Kota Negara di Kabupaten Penajam Paser Utara (Jalan, Pembebasan Lahan, Bendungan, Jalan Tol) bagi masyarakat lokal kabupaten penajam paser utara yang secara langsung terkena dampak dari pembangunan infrastruktur Ibu Kota Baru. Pembangunan Infrastruktur merupakan salah satu pemegang peran penting dalam kehidupan, terutama infrastruktur jalan selain sebagai sarana dan prasarana transportasi juga merupakan aspek pendukung dalam pendistribusi baik barang maupun pendukung lainnya (Agustin & Hariyani, 2023). Kemudian Infrastruktur akan mempengaruhi peningkatan produktivitas pada sektor produksi suatu daerah terutama Kabupaten Penajam Paser utara yang di pilih sebagai wilayah Ibu Kota Baru. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No 38 Tahun 2004 tentang jalan yang memahamkan bahwa jalan sebagai bagian sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial budaya, serta lingkungan agar tercipta kesejahteraan bagi umum.

Kalimantan Timur tepatnya di daerah Kabupaten Penajam Paser Utara pada tanggal 16 agustus 2019 telah dipilih menjadi lokasi atas rencana pemindahan Ibu Kota Baru. Urgensi pemerintah dalam wacana tersebut ialah untuk mengubah arah pembangunan nasional menjadi lebih merata, terlihat dari konsentrasi pemerintahan serta kegiatan perekonomian yang masih terpusat di Kota Jakarta dan juga Jawa. Selain resiko bencana yang minim, ketersediaan lahan yang dimiliki oleh negara juga menjadi alasan Kabupaten Penajam Paser Utara dipilih dengan letak geografis yang strategis (Hasibuan & Aisa, 2020). Berkaitan dengan pemindahan Ibu Kota Baru tersebut telah menarik daya semangat baik pemerintah Provinsi maupun pemerintah daerah untuk terus gencar melakukan pembangunan infrastruktur sebagai prasarana penyangga Ibu Kota Baru, dalam pembangunan infrastruktur tentunya menjadi tanggung jawab bersama baik Pemerintah Pusat, Provinsi, Maupun daerah (Annisa & Nandy, 2024; Muharam, 2023).

Penelitian ini berpusat pada terkait transformasi Penetapan Ibu Kota Negara dalam Pelayanan Infrastruktur Ibu Kota Negara di Kabupaten Penajam Paser Utara terutama dalam

tahap awal terkait mempersiapkan Infrastruktur baik Jalan, Pembebasan Lahan, maupun jalan Tol sebagai akses untuk melakukan kegiatan dalam mendukung berjalannya pembangunan Ibu Kota Baru maupun aspirasi warga lokal penajam paser utara supaya tidak ketertinggalan (Maku et al., 2023). Hal tersebut seiring dengan pendapat masyarakat dimana meminta agar Perbaikan Infrastruktur Khususnya lebih memfokuskan pada pembangunan yang menjadi prioritas kebutuhan masyarakat dan pendukung akses dalam menyangga Ibu Kota Baru yaitu pada pembangunan jalan, mengingat bahwasannya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD 2018-2023) menggambarkan kondisi jalan yang rusak berat yaitu 32,15 km pada ruas jalan Semoi, kemudian pada ruas jalan Sepaku- Petung (Penajam) sepanjang 48,72 km. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tranformasi penetapan ibu kota negara dalam pelayanan publik terkait infrastruktur di Kabupaten Penajam Paser Utara.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan jenis penelitiannya adalah kualitatif. Menurut Moleong (2019) bahwa "Penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati". Metode kualitatif dipilih dengan pertimbangan bahwa metode ini diharapkan dapat diperoleh data yang sebenarnya dan mampu mengkaji masalah peneliti secara mendalam sehingga dapat diperoleh hasil yang diharapkan (A. E. Wibowo, 2021).

Penggunaan metode penelitian kualitatif ini dirasakan sangat tepat dalam studi administrasi publik. Data hasil penelitian diperoleh langsung dari lapangan, melalui: (1). Wawancara, yaitu unstructured interview (wawancara tidak terstruktur) dan semistructured interviews (wawancara semi terstruktur). Wawancara tidak terstruktur dilakukan dalam kesempatan-kesempatan tertentu secara spontan. Sedangkan dalam wawancara semi terstruktur, peneliti telah membuat pedoman wawancara. Namun, pertanyaan berkembang dari pedoman. (2). Observasi, di mana peneliti mengambil catatan lapangan terhadap perilaku dan aktivitas individu di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi sebagai non participant. Data Sekunder adalah berupa informasi yang tidak diperoleh dari lapangan langsung, melainkan diperoleh dari sumber-sumber lain yang mempunyai kontekstualitas yang sama, yang diperoleh melalui studi dokumentasi (John W.

---

Creswell, 2018). Terakhir, analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis interaktif dari Miles, Huberman dan Johny Saldana (Miles et al., 2018).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kualitas Pelayanan**

Kualitas pelayanan (service quality) adalah hasil persepsi dari perbandingan antara harapan dengan kinerja aktual yang diterima pelanggan (Erlianti, 2019). Rinaldi (2012) menyatakan bahwa : "Peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Usaha ini dilakukan dengan pelaksanaan visi dilakukan untuk hasil terbaik (prima) yakin pelaksanaan fungsi pelayanan yang bermutu, cepat, mudah, murah dan memuaskan". Pelayanan merupakan respon terhadap kebutuhan manajerial yang hanya terpenuhi jika pengguna jasa itu mendapatkan produk yang mereka inginkan (A. Wibowo, 2014).

Untuk dapat mengetahui apa yang menjadi harapan masyarakat serta untuk dapat menilai kualitas pelayanan yang baik, Charles H Levine dalam bukunya yang berjudul *Public Administration; Challenge, Choices, Consequences* membagi tiga dimensi kualitas pelayanan yaitu responsiveness, responsibility dan accountability (Levine et al., 1990). Adapun uraian terkait tiga dimensi tersebut Levine mengemukakan sebagai berikut : "In describing desirable relationship between public agencies and democratic society, three concepts-responsiveness, responsibility and accountability-repeatedly surface. Some observers use these terms interchangeably. In fact, however, they have different meanings and at times imply contradictory courses of action. These contradiction help make the work of policy makers and public administrators complex and challenging". Levine dalam Mulyana (2015), Dari pendapat Levine diatas menjelaskan, bahwa untuk menggambarkan hubungan antara lembaga-lembaga publik sebagai penyelenggara layanan kepada masyarakat selaku pengguna layanan, dapat dilihat melalui tiga konsep yaitu responsiveness, responsibility dan accountability. Lebih lanjut Levine dalam Mulyana (2015), menjelaskan dimensi kualitas pelayanan responsiveness, responsibility dan accountability sebagai berikut:

1. Responsiveness Levine dalam Mulyana (2016), menjelaskan tentang responsiveness yakni, "citizens expect civil servants to be responsive to their request and demands" dari pendapat ini dijelaskan, bahwa masyarakat sebagai pengguna layanan berharap petugas penyelenggara layanan tanggap terhadap permintaan

dan tuntutan mereka. Namun Levine juga menegaskan “the wants and demands of citizens may be infinite, but the laws and resources of government are clearly finite” pendapat ini menjelaskan bahwa keinginan dan tuntutan masyarakat ini mungkin tak terbatas, tapi hukum dan sumber daya dari pemerintah terbatas.

2. Responsibility Berkaitan dengan responsibility Levine dalam Mulyana (2016), mengemukakan bahwa : “While responsiveness that government officials meet the request and demands of citizens, Responsibility implies that they will adhere to the explicit and implicit values of proper administrations and policy”. Pendapat ini menjelaskan bahwa terdapat perbedaan definisi antara responsiveness dengan responsibility, dimanadalam responsiveness aparat pemerintah sebagai penyelenggara layanan dapat memenuhi permintaan dan tuntutan masyarakat pengguna layanan, sedangkan responsibility menyiratkan bahwa aparat pemerintah selaku penyedia layanan akan mematuhi nilai – nilai eksplisit (jelas atau tegas) dan implisit (tersirat) dari administrasi dan kebijakan yang tepat dari instansi pemerintah itu.
3. Accountability Levine mengemukakan pendapat terkait accountability sebagai berikut “Accountability implies that civil servants ultimately must answer to elected public officials. It sums up the concept of overhead democracy, a method of controlling civil servants by making them subordinate to the will of elected public officials.” Levine dalam Mulyana (2016). Pendapat ini menjelaskan bahwa konsep accountability diatas menyiratkan pegawai negeri sipil selaku penyelenggara pelayanan pada akhirnya harus menjawab kepada pejabat publik yang dipilih rakyat. Hal ini merupakan konsep tertinggi dari demokrasi, sebuah metode pengawasan para pegawai negeri sipil dengan membuat mereka tunduk kepada kehendak pejabat politik yang dipilih rakyat.

### **Kerangka Analisis: Tinjauan Kualitas Pelayanan Publik**

Berdasarkan letak geografis dan juga administratif Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki posisi yang sangat strategis sebagai wilayah yang dilalui jalur transportasi darat trans Kalimantan dan alur transportasi laut yang melalui teluk Balikpapan sehingga memegang

peranan penting dalam penggerak barang dan jasa lintas wilayah antara Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, serta Kalimantan pada umumnya.

Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki 4 kecamatan yang terdiri dari atas 30 Desa dan 24 Kelurahan. Kecamatan Penajam merupakan Kecamatan dengan jumlah desa dan kelurahan terbanyak yaitu 4 Desa dan 19 Kelurahan, Kecamatan Waru dengan 3 Desa dan 1 Kelurahan, Kecamatan Sepaku dengan 4 Kelurahan yang memiliki 11 Desa, sedangkan Kecamatan Babulu memiliki 12 Desa. Selain itu terdapat sumber daya alam yang cukup beragam, baik sumber daya hutan seperti perkebunan, pertanian, perikanan, perternakan, pertambangan potensi ekonomi tersebut merupakan peluang bagi penduduk untuk menambah pendapatan serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kualitas Pelayanan Infrastruktur terkhusus di wilayah yang terkena dampak pembangunan Ibu Kota Baru yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara, dimana sebelum berlangsung pembangunan tahap awal infrastruktur Ibu Kota Baru peneliti mencermati terkhusus diwilayah Kabupaten Penajam Paser Utara yang mana infrastruktur jalan kurang mendukung. Seiring dengan dipilihnya Kabupaten Penajam Paser Utara Sebagai Ibu Kota Negara ada untungnya dalam rangka meningkatkan pelayanan infrastruktur bagi masyarakat lokal penajam paser utara.

Penelitian yang Dampak Penetapan Ibu Kota Negara Terhadap Kualitas Pelayanan Infrastruktur Ibu Kota Negara di Kabupaten Penajam Paser Utara dengan Kerangka analisis yang dipergunakan menggunakan konsep yang dikemukakan oleh Charles H. Levine dalam Mulyana (2016), yang mensyaratkan bahwa pelayanan publik yang baik berpijak pada tiga dimensi yaitu: *Responsiveness*, yaitu daya tanggap penyedia layanan terhadap harapan, keinginan dan aspirasi, tuntutan pengguna layanan. *Responsibility*, yaitu ukuran seberapa jauh pemberian layanan publik dilakukan sesuai prinsip- prinsip, ketentuan administrasi dan organisasi yang benar dan telah ditetapkan. *Accountability*, yaitu ukuran yang menunjukan seberapa besar proses penyelenggaraan pelayanan dapat sesuai kepentingan stakeholders dan norma yang berkembang.

Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara yang sedang berjalan kurang lebih sudah mau satu tahun pengerjaan yang mana saat ini difokuskan untuk pembangunan jalan dan pembangunan bendungan (Sudrajat, 2023). Berdasarkan hasil pengamatan peneliti di

lapangan bahwa saat ini progres pembangunan Jalan inti dari kota balikpapan ke penajam paser utara sedang berlangsung pengecoran yang belum rampung secara keseluruhan.

Pembangunan infrastruktur jalan, bendungan, jembatan penyebrangan, saluran listrik, saluran sinyal, pembangunan Rumah buat pekerja yang saat ini menunjukkan progres yang sedang berjalan dan berlangsung. Sehingga pembangunan infrastruktur tahap awal ini pada dasarnya tidak terlepas dari konsep yang di rencanakan yaitu menjadi kota Hutan, Kota spon serta kota cerdas maka dalam pembangunan Infrstruktur tahap awal ini harus benar-benar serius, konsisten dan harus betul-betul matang sesuai dengan konsep yang telah di rencanakan. Hal tersebut menunjukkan adanya peluang yang bisa di dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan pelayanan bidang insfrastruktur terkhusus bagi masyarakat lokal penajam paser utara, sehingga berbagai ketakutan yang saat ini masyarakat rasakan bisa sinkronkan dan bisa menyesuaikan dan tentunya menjadi warga masyarakat yang berkemajuan dengan adanya perhatian dari pemerintah baik daerah maupun pusat bagi warga lokal penajam paser Utara.

### **Responsivitas**

Dimensi *Responsiveness*, yang peneliti temukan di lapangan sudah tentu banyak aspirasi atau masukan terkhusus dari warga penajam paser utara yang menginginkan infrastruktur yang merata dan bisa di rasakan manfaatnya oleh warga masyarakat. Sisi lain dengan di bangunnya Ibu Kota Negara di Penajam paser utara ada sisi baiknya dan tentu ada sisi kekhawatiran juga dari warga lokal penajam paser utara, hal tersebut sejalan dengan apa yang di sampaikan oleh Camat Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara bahwa :

"Saya selaku camat sepaku yang sudah tentu melayani dan langsung berhadapan dengan warga, tokoh, berusaha memberikan pemahaman yang bisa di terima oleh semua warga terutama di kecamatan saya kecamatan sepakau. Saya di setiap ada pertemuan dengan warga selalu membirikan pencerahan terkait IKN ini, bahwa sebelum di sahkan Undang-Undang IKN juga kami dari kecamatan terus memberikan pemikiran bahwa kita ini sudah di pilih akan mencadi Ibu Kota Negara, wargapun hampir mayoritas menerima dengan kata lain ada permintaan-permintaan atau ada masukan yang harus di persiapan sebelum lkn pindah ke Penajam Paser Utara. Di antaranya mempersiapkan Sumber Daya Manusia Baik Formal maupun non formal untuk meningkatkan kafasitas dan kapabilitas warga lokal supaya siap menjadi tuan rumah yang terampil begitupun banyak sekali masukan dan aspirasi dari warga terutama terkait infrastruktur sebelum masuknya IKN ini yang kami akui memang memprihatinkan juga keberadaan infrastruktur di kami, terutama infrastruk jalan.". (hasil wawancara, 15 September 2022).

Dari hasil wawancara dengan Camat Sepaku yang Langsung terkena Dampak IKN, dimana pemerintah setempat maupun warga menyampaikan keinginan dan semua aspirasi dari warga tersebut sudah seharusnya dan sudah secepatnya bisa di respon dan bisa di implemtasikan, sehingga pemerintah daerah dengan hadirnya Ibu Kota Negara di wilayah Penajam Paser Utara terkhusus Kecamatan Sepaku merasa bangga dan tentunya bisa membantu juga warga terutama dalam percepatan pembangunan infrastruktur.

Melalui mandat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, di bentuk Kepala Otorita, dan pelaksana pembangunan IKN Kementerian PUPR. Yang mana dalam proses pelaksanaannya banyak melibatkan semua komponen untuk pembangunan Infrastruktur IKN. Semua komponen memiliki tujuan yang sama yaitu Sesuai dengan Visi Ibu Kota Negara sebagai Kota Dunia (Kota Berkelanjutan di Dunia, Sebagai penggerak ekonomi indonesia dimasa depan, menjadi simbol identitas nasional yang mempresentasikan keberagaman bangsa indonesia, berdasarkan pancasila dan undang- undang dasar RI tahun 1945). Dalam pembangunan Infrastruktur yang harus relevan dengan tujuan di atas maka tidak memungkinkan di atasi oleh pemerintah saja membutuhkan aspek-aspek di luar pemerintah maka dalam pembangunan infrastruktur IKN yang Visinya Jauh kedepan dan berkelas Dunia maka harus banyak melibatkan berbagai aspek Stakholder. Walaupun pemerintah sebagai pemangku kebijakan tetapi tetap fokus serta mengikuti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022, serta mengikuti sekema sistem Rencana Induk Ibu Kota Nusantara sebagai dokumen perencanaan terpadu dalam melaksanakan persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu Kota Negara. Serta tak kalah penting bagaimana bisa mensejahterakan warga masyarakat Lokal warga penajam paser utara yang terkena dampak langsung Ibu Kota Negara ini (Wahyuddin, 2023). Hal tersebut sejalan dengan pandangan tokoh di Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Urata, Bahwa :

“Kami Mendukung Ibu Kota Negara di wilayah kami tapi sudah tentu kami pun meminta tuntutan supaya warga kami bisa di prioritaskan sehingga warga kami tidak tertinggal dan tidak termarginalkan. Begitupun yang kami harapkan dengan adanya ibu kota di wilayah kami bisa membawa dampak yang baik di setiap sektor warga masyarakat kami terutama akses jalan yang harus bagus. (Hasil Wawancara, 15 September 2022).

### **Tanggung jawab**

Dimensi *Responsibility*, Suatu langkah dalam mencapai tujuan yang besar perlu menumbuhkan Sikap kepercayaan dan respon yang cepat adalah hal yang sangat penting



dimana, sikap dan respon itu harus di bangun oleh semua pemangku kepentingan (Sitorus & Harahap, 2019). yang dilakukan dengan adanya rapat atau pertemuan pada saat penyusunan Rencana Aksi pembangunan Infrastruktur. Walaupun sebagaian pihak tidak di libatkan dalam Rencana Aksi, tetapi dalam pelaksanaan di butuhkan berbagai sumbangsih Baik dalam hal pemikiran atau yang lainnya, sehingga akan tumbuh rasa kepercayaan yang terbangun. Hal tersebut sejalan dengan apa yang di katakan oleh pihak Kecamatan Sepaku dalam persiapan tahap awal ini:

“karna IKN ini program pusat, kami di daerah tidak bisa apa-apa namung saya sebagai camat selalu memberikan harapan yang fositip untuk warga saya. Dan kami pun tidak hanya membantu menjembatangani saja antara komunikasi pemerintah pusat dengan warga tetapi kami pun di daerah sepakat dengan warga, tokoh adat semuanya dalam pembangunan infrastruktur IKN ini harus meilbtkan warga serta IKN ini adalah Kepercayaan Pusat kepada kami, di sisi lain kami juga membuat komitmen peluncuran perbagai program untuk peningkatan kompetensi warga kami baik formal maupun nonformal. Hal ini terbukti warga kami sudah dan sedang berjalan di beri berbagai pelatihan baik dari pemerintah pusat, Provinsi maupun Kabupaten. Dalam hal ini kami bersinergi untuk mempersiapkan Sumber daya yang berkualitas dan siap bersaing tidak hanya menjadi penonton saja tatakala nanti sudah beroperasi IKN di Wilayah Kami ini”. (hasil wawancara, 15 September 2022).

Hal ini Sejalan dengan apa yang di sampaikan oleh Tokoh warga di Kecamatan Sepaku mengatakan Bahwa:

“ Kami sebagai warga negara yang baik secara formilnya menerima IKN di wilayah kami, walaupun kami terus terang saja ada rasa kekawatiran sampai dengan saat ini, di antaranya kami khawatir termarginalkan atau terpinggirkan sebagai warga lokal oleh pendatang, kedua kehwatitan kami takutnya peran partisipasi warga lokal kami takut di perlemah juga, saya berharap sebagai tuan rumah tidak mau menjadi penonton saja tetapi harus ikut serta walaupun tidak sebagai pelopor karna kami pun merasa sangat kurang. untuk kemampuan SDM kami di banding dengan SDM yang ada di luar Kalimantan”. (Hasil wawancara, 16 September 2022).

Berdasarkan hasil observasi dilapangan bahwa kesamaan tujuan dalam membangun kepercayaan yang ingin dicapai dalam pembangunan infrastruktur IKN yang optimal merupakan hal yang penting dan tentunya harus mendapatkan respon yang jelas dan cepat memingat ini berkaitan untuk masadepan dan kesejahteraan waraga kabupaten penajam paser utara.

### **Akuntabilitas**

Berkaitan dengan progres pembangunan Infrastruktur baik jalan, Jembatan, bendungan maupun infrastruktur lainnya sedang berjalan di wilayah Ibu Kota Baru dan

harapannya bisa berdampak besar dan bisa di manfaatkan dengan baik oleh warga Lokal Penajam Paser Utara (Juwono et al., 2022). Progres pengerjaan Infrastruktur ini sudah berjalan kurang lebih mendekati satu tahun maka yang paling di tekan kan bagaimana tingkat keterbukaan kepada publik dan tingkat progres keberhasilan baik secara subsatnsi untuk IKN itu sendiri maupun manfaat untuk warga Lokal Penajam Paser Utara, sehingga bisa menjawab kekawatiran saat ini yang tumbuh pada sebagaian warga yang terdampak. Hal tersebut dapat dilihat pada dokumentasi yang ada sebagai berikut (Gambar 1)



**Gambar 1. Progres Pembangunan Jalan dan Jembatan Dalam Komplek IKN**  
**Sumber: Observasi Peneliti, 2023**

## **SIMPULAN**

Berhasil tidaknya pembangunan Ibu Kota Baru, sangat ditentukan bagaimana *estafet* kepemimpinan kedepannya yang akan berdampak langsung kepada kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada warga lokal Penajam Paser Utara yang sedang berlangsung seperti Infrastruktur jalan dan lebih lanjutnya lagi akan berdampak pada kualitas pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Fungsi utama pemerintahan adalah pelayanan publik sesuai dengan bentuk pemerintahan kita yang menganut sistem Republik (dari re dan publik artinya kembali kepada publik) yang didasari oleh sistem politik demokrasi (artinya pemerintahan oleh rakyat). Maka ketika suatu pemerintahan tidak melayani publik sesungguhnya ia telah gagal. Alat ukurnya dapat dibreakdown dengan tiga alat ukur seperti *responsivness, responbility dan accountability*. Implementasi ketiga alat ukur ini di Penajam

Paser Utara masih belum optimal sepenuhnya, dikarenakan dampak dari IKN ini belum rampung sepenuhnya.

Adapun temuan dalam penelitian ini, berdasarkan tiga alat ukur *responsivness*, *responbility* dan *accountabilit*, yang paling menonjol adalah Responsivness yang mana warga menumbuhkan harapan besar atas di tetapkannya Penajam Paser Utara sebagai Ibu Kota Negara. Berdasarkan temuan peneliti di lapangan bisa di katakan dampak dari di tetapkannya Ibu Kota Negara di Kabupaten Paser Utara ini terbagi menjadi dua; (1). Dampak yang Positif, salah satunya warga masyarakat menggantungkan harapan yang tinggi dan cita-cita besar dengan hadirnya IKN di Penajam Paser Utara. Baik dari Pembangunan Infrastruktur yang akan berubah total dari sebelumnya yang memprihatinkan. (2). Dampak Negatif, salahsatunya warga ada sikap kekeawatiran dengan hadirnya IKN ke Penajam Paser Utara salah satunya warga lokal takut terpengcilkan atau termarginalkan oleh pendatang mengingat warga penajam paser utara masih rendah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Agustin, I. W., & Hariyani, S. (2023). *Pengelolaan infrastruktur kota dan wilayah*. Universitas Brawijaya Press.
- Annisa, N. N., & Nandy, D. (2024). Global Tax Trends and Transformations: A Literature Review on Change and Adaptation. *Jurnal Perpajakan Dan Keuangan Publik*, 3(1), 29-35.
- Erlianti, D. (2019). Kualitas pelayanan publik. *Jurnal Administrasi Publik Dan Bisnis*, 1(1), 15-28.
- Hasibuan, R. R. A., & Aisa, S. (2020). Dampak Dan Resiko Perpindahan Ibu Kota Terhadap Ekonomi Di Indonesia. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(1), 183. <https://doi.org/10.30829/ajei.v5i1.7947>
- John W. Creswell. (2018). *Pendektan metode kualitatif, kuantitatif dan campuran* (4th ed.). Pustaka Pelajar.
- Juwono, P. T., Subagiyo, A., & Winarta, B. (2022). *Neraca Sumber Daya Air dan Ruang Kota Berkelanjutan*. Universitas Brawijaya Press.
- Levine, C. H., Peters, B. G., & Thompson, F. J. (1990). *Public Administration: Challenges, Choices, Consequences*. Scott, Foresman.
- Maku, S., Akili, R. H., & Kadir, Y. (2023). Analisis Strategi Politik Hukum Terhadap Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara Dalam Perspektif Geopolitik Dan Geostrategi. *Iblam Law Review*, 3(2), 152-172.

- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2018). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. Sage publications.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Muharam, S. (2023). Urgensi Infrastruktur Pendidikan Sebagai Wajah Peradaban Baru Ibu Kota Negara Indonesia Menuju Generasi Emas 2045. *Journal Education Innovation (JEI)*, 1(1), 106-113.
- Mulyana, Y. (2016). KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR PASCA PEMEKARAN DAERAH DI KABUPATEN BANDUNG BARAT. *SEMINAR HASIL-HASIL PENELITIAN 2015*.
- Rinaldi, R. (2012). Analisis kualitas pelayanan publik. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 2(1), 22-34.
- Sitorus, A., & Harahap, H. A. (2019). *Gerakan inovasi mendidik berkarakter*. Swalova Publishing.
- Sudrajat, A. (2023). Culture Shock Penduduk Desa Sekitar Titik Pusat Nusantara dengan Adanya Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). *Paradigma*, 12(3), 261-270.
- Wahyuddin, W. (2023). Dari Jakarta ke Penajam: Membangun Kota, Mengonstruksi Makna dan Budaya. *Jurnal Sejarah Indonesia*, 6(2), 121-134.
- Wibowo, A. (2014). Pengaruh Kualitas Pelayanan Transportasi Umumbus Trans Jogja Terhadap Kepuasan Konsumen. *Jurnal Ilmu Manajemen UNY*, 11(2), 67-81.
- Wibowo, A. E. (2021). *Metodologi Penelitian Pegangan untuk Menulis Karya Ilmiah*. Penerbit Insania.